

TESIS

Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Pembangunan Usaha Tambak di Kawasan Sempadan Pantai di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Andalas*



LISA MEDIKA YATI
NIM. 2120112042

Dosen Pembimbing :

Dr. Rembrandt, S.H.,M.Pd
Dr.Syofiarti, S.H., M.H

JURUSAN ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023

UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN USAHA TAMBAK DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(Lisa Medika Yati, 2120112042. Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan usaha tambak udang yang selalu berkembang di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi sebagian besar tambak udang dibangun belum sesuai instrumen hukum lingkungan. Hal ini dibuktikan masih banyaknya tambak udang belum sesuai instrumen hukum lingkungan seperti belum memiliki izin, prinsip tata ruang, Amdal dan lain sebagainya. Pembangunan di kawasan sempadan pantai yang begitu luas dengan luas lebih dari 84 Ha. Tambak yang begitu luas berpeluang merubah bentang alam, dapat juga diklarifikasikan dalam usaha berdampak penting, usaha berdampak penting dapat digolongkan dalam usaha yang harus memiliki Amdal. Selain itu, usaha tambak sebagian besar dibangun dikawasan sempadan pantai dengan jarak kurang dari 50 meter sedangkan 100 meter dari titik pasang tertinggi tidak boleh dibangun, karena termasuk kawasan sempadan pantai. Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa pertanyaan penelitian yang penulis gunakan diantaranya, Bagaimana penertiban usaha tambak udang yang belum sesuai instrumen hukum lingkungan?, Apa Kendala dalam Menertibkan Usaha Tambak Udang yang Belum sesuai Instrumen Hukum Lingkungan di Kecamatan Batang Anai? dan Bagaimana Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Menertibkan Usaha Tambak Udang sesuai Instrumen Hukum Lingkungan?. Metode penelitian yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris disamping pendekatan normatif serta teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Dianalisis menggunakan empat komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan *Pertama*, Sebagian besar usaha tambak udang di kecamatan Batang Anai belum berwawasan lingkungan disebabkan oleh kesulitan para pengusaha dalam mengurus dokumen Amdal. Karena dalam mengurus dokumen Amdal membutuhkan biaya yang lumayan besar. Sedangkan usaha tambak udang harus memiliki kawasan Amdal. *Kedua*, Pemerintah telah mengupayakan dalam menertibkan usaha tambak udang yang belum berwawasan lingkungan di Kecamatan Batang Anai, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman membentuk Amdal kawasan, agar memudahkan bagi para pengusaha untuk mengurus izin usaha. Serta menetapkan kawasan sempadan pantai Kabupaten Padang Pariaman, agar tidak dilakukan pembangunan dikawasan sempadan pantai. Karena kawasan sempadan pantai merupakan kawasan lindung.

Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Tambak Udang, Hukum Lingkungan, Amdal Kawasan.

LOCAL GOVERNMENT EFFORTS TO OVERCOME ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO THE CONSTRUCTION OF PONDS IN THE COASTAL BORDER AREA IN BATANG ANAI SUB-DISTRICT, PADANG REGENCY

(Lisa Medika Yati, 2120112042, Master of Law,
Faculty of Law Andalas University, 2023)

ABSTRACT

This research is motivated by the development of shrimp ponds that are always growing in Batang Anai District, Padang Pariaman Regency. However, most shrimp ponds are built not in accordance with environmental law instruments. This is evidenced by the fact that many still do not have a permit because they do not comply with environmental law instruments and spatial principles. Based on the above background there are two research questions that the author uses including, What are the Obstacles in Curbing Shrimp Pond Businesses that are not yet Environmentally Sound in Batang Anai District? and What Efforts should be made by the Regional Government of Padang Pariaman Regency in Curbing Shrimp Pond Businesses that are not yet Environmentally Sound?. The research method used is descriptive qualitative analysis with an empirical juridical legal approach in addition to normative approaches and data collection techniques of interviews, observation, literature study and documentation. Analyzed using four components of analysis, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the research that the authors get First, most of the shrimp pond businesses in Batang Anai sub-district have not been environmentally sound due to the difficulty of entrepreneurs in taking care of EIA documents. Because in taking care of Amdal documents require a fairly large cost. While the shrimp farming business must have an EIA area. Second, the government has attempted to curb the business of shrimp ponds that are not environmentally friendly.

Keywords: *Control, Shrimp Ponds, Environmental Law, Area EIA*

